

Analisa faktor keberhasilan dalam memanfaatkan Teknologi Informasi pada pelaksanaan eKTP di Kota Palembang

Terttiaavini

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indo Global Mandiri
Jl. Jend Sudirman No. 629 Km 4 Palembang
avini.saputra@yahoo.com

Abstrak—Mendagri menargetkan pelaksanaan proyek eKTP harus selesai pada tanggal 30 april 2012. Namun kenyataanya, banyak provinsi di Indonesia yang belum dapat mencapai target tersebut. Kota Palembang telah berhasil melaksanakan pendataan eKTP lebih cepat dari target yang telah ditentukan yaitu bulan maret 2012. Ini merupakan wujud keseriusan instansi pemerintahan kota Palembang dalam mendukung program eKTP di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang pendukung keberhasilan dan kendala / masalah pada pelaksanaan eKTP di kota Palembang dalam memanfaatkan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data dan Informasi yang dibutuhkan adalah dengan cara studi pustaka dan studi lapangan (yaitu observasi, wawancara dan kuesioner). Indikator perumusan instrumen data menggunakan framework cobit dan perhitungan data menggunakan maturity model. Hasil dari penelitian ini menguraikan dengan rinci faktor keberhasilan, kendala, serta harapan perbaikan sistem pelaksanaan eKTP. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem eKTP kedepan dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain, dikarenakan kota Palembang mendapat penghargaan atas komitmen dalam pelaksanaan pelayanan penerapan eKTP di kota Palembang.

Kata kunci : eKTP, framework Cobit, Maturity Model

I. PENDAHULUAN

Gagasan untuk mewujudkan sistem administrasi penduduk yang tersentralisasi menghasilkan ide, dimana merubah sistem KTP Nasional yang dipakai selama ini dengan sistem elektronik yang disebut eKTP..

Sistem eKTP memanfaatkan teknologi informasi dalam pengolahan data dengan menggunakan database tersentralisasi di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Pusat. Kegiatan pendataan eKTP ini sudah dilaksanakan serentak di seluruh provinsi di Indonesia sejak bulan November 2011. Begitu juga di Kota Palembang, pemerintah setempat telah gencar mensosialisasikan pelaksanaan eKTP ini, agar pelaksanaannya dapat sukses sesuai seperti yang diharapkan.

Pemkot Kota Palembang menetapkan pelaksanaan pendataan eKTP di tingkat kota harus sudah selesai pada tanggal 30 Maret 2012. Ketetapan ini merupakan penargetan yang lebih awal dari yang ditentukan oleh Pemerintah pusat,

yakni batas terakhir pendataan eKTP gelombang pertama pada akhir bulan April 2012.

Kerja keras dan keseriusan Pemkot Kota Palembang membuahkan hasil. Kota Palembang mendapatkan penghargaan atas pelaksanaan eKTP sebagai Provinsi yang pertama di Indonesia yang menyelesaikan pendataan eKTP, lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Hal ini tak lepas dari dukungan yang serius dari Pemda, masyarakat serta prosedur pelaksanaan yang menunjang suksesnya pelaksanaan eKTP tersebut.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk menganalisa faktor apa saja yang mendukung keberhasilan pelaksanaan eKTP tersebut yang memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga pelaksanaan eKTP berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian eKTP

Adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana [7].

B. Tujuan eKTP

Tujuan dari penerapan KTP elektronik (e-KTP) adalah mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional. (biodata,foto,sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan dalam fisik e-KTP [1].

C. Fungsi eKTP

Fungsi dari penggunaan eKTP adalah

- 1) Sebagai identitas jati diri
- 2) Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
- 3) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan [2].

D. Manfaat eKTP

Manfaat dari penerapan KTP elektronik (e-KTP) adalah

- 1) Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum pada masyarakat.
- 2) Untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu & Pemilukada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.
- 3) Untuk mempermudah dan memberikan keamanan dalam pelayanan di berbagai sektor baik Instansi pemerintah maupun swasta [1].

E. Framework COBIT

Cobit adalah *Control Objectives for Information and Related* yang merupakan audit sistem informasi, dimana dasar pengendalian dibuat oleh *Information Systems Audit and Control Association* (ISACA) dan *IT Governance Institute* (ITGI) [4].

Cobit merupakan sekumpulan dokumentasi *best practices* untuk *IT Governance* yang dapat membantu auditor, pengguna (user) dan manajemen untuk menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI. Konsep dari perangkat kerja Cobit adalah pengawasan pada TI yang melakukan pendekatan dengan memperhatikan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan pemerintah atau kebutuhan instansi pemerintahan dan dengan memperhatikan informasi yang menjadi hasil dari kombinasi penerapan TI yang dikaitkan dengan sumber daya yang dibutuhkan yang dapat diatur oleh proses TI.

Cobit bermanfaat bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam identifikasi *IT controls issues*. Cobit dikeluarkan oleh ITGI dapat diterima secara internasional sebagai praktek pengendalian atas informasi, IT dan resiko terkait Cobit juga berisi tujuan pengendalian, petunjuk audit, kinerja dan hasil metrik, faktor kesuksesan (*Key success*) dan model kematangan (*Maturity model*). Menurut *IT Governance Institute*, definisi *Cobit Framework* terdiri atas 4 domain yaitu [4]:

1. Perencanaan dan organisasi (*Planning and Organisation*)
Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi pemerintah.
2. Akuisisi dan penerapan (*Acquisition and Implementation*)
Domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan dan penerapan teknologi informasi yang digunakan.
3. Pengantaran dan Dukungan (*Delivery and Support*)
Domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya.
4. Monitor dan evaluasi (*Monitoring*)
Domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan pengelolaan TI pada organisasi.

F. Model Kematangan Cobit (Maturity Model)

Cobit memiliki model kematangan (*Maturity model*) untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian (*scoring*) sehingga suatu organisasi dapat menilai

proses TI yang dimilikinya dari skala *nonexistent* sampai dengan *optimised* (dari 0 sampai 5).

Menurut *IT Governance Institute* pemetaan status kematangan proses teknologi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut [4]:

1. Skala 0 : Tidak ada Proses (*Non-Existent*);
Sama sekali tidak ada proses IT yang diidentifikasi. Organisasi belum menyadari adanya isu yang harus dibahas.
2. Skala 1 : Inisialisasi (*Initial / ad Hoc*);
Organisasi sudah mulai mengenali proses teknologi informasi dipemerintahnya, belum ada standarisasi, dilakukan secara individual, dan tidak terorganisasi.. Tidak ada proses yang baku, sebagai gantinya ada pendekatan khusus (*adhoc*) yang cenderung diterapkan perkasus. Pendekatan manajemen secara keseluruhan masih belum terorganisir.
3. Skala 2 : Dapat berulang (*Repeatable*);
Organisasi sudah mulai memiliki prosedur dalam proses teknologi informasi tetapi tidak ada pelatihan dan komunikasi formal tentang prosedur standar tersebut. Tanggung jawab terhadap proses tersebut masih dibebankan pada individu dan tingkat ketergantungan pada kemampuan individu sangat besar sehingga terjadi kesalahan.
2. Skala 3 : Ditetapkan Proses (*Defined Process*);
Prosedur di organisasi sudah distandarisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan tetapi implementasi masih tergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau tidak.
3. Skala 4 : Sudah dikelola dan terukur (*Managed and Measurable*);
Organisasi dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan perangkat teknologi informasi yang digunakan terbatas.
4. Skala 5 : Optimal (*Optimized*);
Proses yang ada sudah mencapai *best practice* melalui proses perbaikan yang terus menerus. Teknologi informasi sudah digunakan terintegrasi untuk otomatisasi proses kerja dalam organisasi, meningkatkan kualitas, efektivitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap organisasi.

Rinci skala kematangan dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. REPRESENTATION MATURITY INDEX [4]

Maturity Index	Maturity levels
0 – 0,50	0 – <i>Non existent</i> (Tidak ada Proses)
0,51 – 1,50	1 - <i>Initial / sd Hoc</i> (Inisialisasi)
1,51 – 2,50	2 - <i>Repeatable but Intuitive</i> (Dapat berulang)
2,51 – 3,50	3 - <i>Defined Process</i> (Ditetapkan Proses)
3,51 – 4,50	4 - <i>Managed and Measurable</i> (Sudah dikelola dan terukur)
4,51 – 5,00	5 - <i>Optimized</i> (Optimal)

G. Teknologi Informasi

Adalah Teknologi informatika yang mampu mendukung percepatan dan meningkatkan kualitas informasi, serta percepatan arus informasi ini tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu” [8].

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu manusia bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi.

Perangkat teknologi informasi pendukung pelaksanaan eKTP di tingkat Kecamatan adalah

a) Perangkat Keras, terdiri atas :

- Server untuk Database dan AFIS	1 buah
- UPS 2200VA.	1 buah
- Komputer Desktop	2 buah
- UPS 1000VA	2 buah
- Fingerprint Scanner.	2 buah
- Signature Pad.	1 buah
- Iris Scanner.	2 buah
- SmartCard Reader/Writer	2 buah
- Digital Scanner.	1 buah
- Switch dan Cabling	1 buah
- Harddisk Eksternal (Backup Data)	2 buah
- Kamera Digital/ Web Camera	2 buah
- Tripod.	2 buah

Sumber : *Dirjen Dukcapil RI (2011)*

b) Perangkat Lunak, terdiri dari :

- Operating Sysem (OS) Windows server	1 buah
- Database Engine (Standar edition per 5 user)	1 buah
- Aplikasi Perekaman Sisik Jari	1 buah
- Anti virus Client & Anti Virus Server	1 buah

Sumber : *Dirjen Dukcapil RI (2011)*

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Menurut Suryo Guritno, teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data [3]. Dalam penelitian ini, menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu :

1) Metode Kuesioner (Angket)

Yaitu jenis teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Angket berisikan daftar pertanyaan yang memberi pilihan jawaban pada responden berdasarkan proses pada *framework Cobit*.

2) Metode Interview (wawancara)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dari sumbernya yaitu Kadin Dukcapil Kota Palembang, camat seberang ulu I, camat seberang ulu II, camat 8 Ilir, camat ilir barat I.

3) Metode Observasi

Maksudnya adalah mengadakan pengamatan secara langsung pada tempat/ruang pendataan eKTP di empat Kecamatan yang terpilih.

B. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara, observasi dan analisa terhadap masalah yang ditemukan di lapangan sehingga dapat disimpulkan dengan jelas faktor apa saja yang menjadi indikator keberhasilan serta kendala dalam pelaksanaan eKTP.

Skala pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *skala linkert* yaitu

1. Sangat Tidak setuju
2. Kurang setuju
3. Setuju
4. Sangat setuju

Skala linkert ini selanjutnya dikonversi kedalam tabulasi data dengan menggunakan Tingkat nilai kepatuhan (*Agreement with Statement*) dibuat berdasarkan *framework Cobit*. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2. TINGKAT NILAI KEPATUHAN [6]

Tingkat persetujuan terhadap pernyataan (<i>Agreement with Statement</i>)	Konversi ke Nilai	Nilai kepatuhan (<i>Compliance Value</i>)
Sangat tidak setuju	1	0
Kurang setuju	2	0.33
Setuju	3	0.66
Sangat setuju	4	1

Hasil kuesioner dimasukkan kedalam tabulasi data. Dengan menggunakan skema katagorisasi menurut *Maturity Model* akan ditentukan tingkat kepentingan untuk masing-masing butir kuesioner [6]. Untuk menghitung Total nilai kepatuhan (*Total Maturity Level*) pada setiap proses, maka terlebih dahulu akan dihitung beberapa nilai yaitu

- 1) Total Nilai Kepatuhan pada tingkat Kematangan (*Total Statements compliance Value*).
- 2) Menghitung Nilai Kepatuhan pada tingkat Kematangan (*Maturity level compliance value*).
- 3) Menghitung Faktor Kepatuhan Normalisasi (*Normalized compliance values*).
- 4) Menghitung Tingkat Kematangan (*Computation of the Summary Maturity Level*)

Hasil akhir dari Penilaian Model kematangan ini adalah nilai kematangan untuk tiap proses pada *framework Cobit*. Nilai kematangan (*Maturity level*) menunjukkan tingkat keberhasilan suatu proses pada organisasi.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuesioner (angket) dalam mengumpulkan data. Domain pada *Framework Cobit* yang digunakan dalam pembuatan Instrumen data adalah pengiriman dan dukungan (*delever and support*)

Adapun proses Cobit dalam *framework Cobit* yang menjadi indikator penelitian diperlihatkan pada Tabel 3.

TABEL 3. PROSES COBIT DAN PENDEFINISIAN PROSES [4]

Proses	Defenisi Proses
PD1	<i>Define service levels</i> (Menentukan dan mengelola tingkat layanan)
PD3	<i>Manage performance and capacity</i> (Mengelola Performa dan Kapasitas)
PD4	<i>Ensure continuous service</i> (Meyakinkan keberlanjutan sistem)
PD5	<i>Ensure systems security</i> (Memastikan keamanan sistem)
PD7	<i>Educate and train users</i> (Mendidik dan melatih pengguna)
PD10	<i>Manage problems and incidents</i> (Mengelola masalah)
PD11	<i>Manage data</i> (Mengelola Data)

IV. PEMBAHASAN

A. Demografi Responden

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 26 responden operator eKTP, diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Karakteristik responden operator eKTP berdasarkan pendidikan.
Penelitian ini menemukan jumlah responden terbanyak berlatar belakang pendidikan SMU yaitu 13 responden dengan nilai persentase 50.2%. Dapat dilihat pada Tabel 4.

TABEL 4. KARAKTERISTIK RESPONDEN OPERATOR EKTP BERDASARKAN PENDIDIKAN

Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
SMU	13	50.2
D3	4	19.2
S1	8	30.8
S2	0	0.0

- 2) Karakteristik Responden operator eKTP berdasarkan status pekerjaan.
Penelitian ini menemukan jumlah responden terbanyak merupakan pegawai Honorer yaitu 24 responden dengan nilai persentase 92.3%. Dapat dilihat pada table 5.

TABEL 5. KARAKTERISTIK RESPONDEN OPERATOR EKTP BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN

Status Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
Pegawai Negeri	2	7.7
Pegawai Honorer	24	92.3

B. Analisa Deskriptif

Data yang diambil dari hasil koesioner dan wawancara akan diproses dengan suatu metode agar dapat menghasilkan

informasi yang dibutuhkan. Data-data statistik yang diperoleh melalui survei dengan kuesioner dan wawancara dimasukkan kedalam tabel untuk dihitung berdasarkan kategori tertentu.

Ada beberapa tahapan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan *maturity model*. Hasil dari perhitungan menghasilkan nilai tingkat kematangan dari masing-masing proses dan nilai kegiatan. Nilai tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

- 1) Nilai tingkat kematangan (*Maturity Level Value*) pada wajib eKTP

TABEL 6. NILAI TINGKAT KEMATANGAN OPERATOR EKTP

Cobit Process		Maturity	Maturity levels
PD1	<i>Define service levels</i> (Menentukan dan mengelola tingkat layanan)	2.845	Ditetapkan Proses
PD3	<i>Manage performance and capacity</i> (Mengelola Performa dan Kapasitas)	2.948	Ditetapkan Proses
PD4	<i>Ensure continuous service</i> (Meyakinkan keberlanjutan sistem)	2.945	Ditetapkan Proses
PD5	<i>Ensure systems security</i> (Memastikan keamanan sistem)	3.124	Ditetapkan Proses
PD7	<i>Educate and train users</i> (Mendidik dan melatih pengguna)	3.047	Ditetapkan Proses
PD10	<i>Manage problems and incidents</i> (Mengelola masalah)	3.007	Ditetapkan Proses
PD11	<i>Manage data</i> (Mengelola Data)	3.056	Ditetapkan Proses

Nilai maturity diatas 2.5 menunjukkan bahwa proses pelaksanaan eKTP adalah Ditetapkan Proses. Ini berarti pelaksanaan eKTP di kota Palembang : Prosedur di organisasi sudah distandarisasi, terdokumentasi, dan dikomunikasikan melalui pelatihan tetapi implementasi masih tergantung pada individu apakah mau mengikuti prosedur tersebut atau tidak.

- 2) Hasil evaluasi pertanyaan pada kuesioner
Hasil evaluasi dari pembagian kuesioner dapat disimpulkan menjadi 2 katagori, yaitu
 - a) Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan eKTP.
Permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan perekaman eKTP dijelaskan pada Tabel 7.

TABEL 7. PENILAIAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN EKTP OLEH OPERATOR EKTP

No	Kegiatan yang dinilai	Jumlah Responden
1.	Wajib eKTP yang tidak mau antri dengan baik.	10
2.	Mati lampu.	10
3.	Sidik jari lansia yang sulit tersimpan.	5
4.	Kerusakan Server	2

5.	Warga yang tidak sempat datang ke kantor kecamatan.	1
6.	Alat sidik jari sering error.	2
7.	Sidik jari yang berubah.	1
8.	Data dihapus karena terdeteksi memiliki data ganda.	5
9.	Jaringan internet disconnect.	5
10.	Foto warga yang tidak center.	1
11.	Data yang salah yang tidak bisa diperbaiki.	2

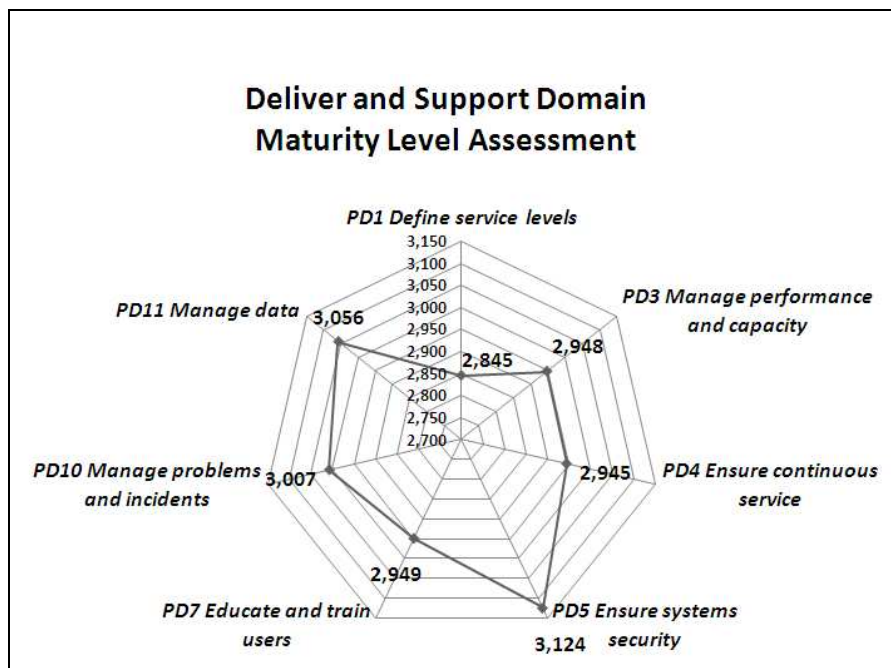
- b) Kegiatan yang mendukung keberhasilan eKTP.
Kegiatan yang menjadi pendukung keberhasilan saat pelaksanaan perekaman eKTP dijelaskan pada table dibawah ini :

TABEL 8. PENILAIAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN EKTP OLEH OPERATOR EKTP

No	Kegiatan yang dinilai	Jumlah Responden
1.	Instansi terkait selalu mensosialisasikan pelaksanaan eKTP.	12
2.	Kerjasama yang baik antar operator eKTP dengan pimpinan diastasnya.	2

3.	Selalu melakukan Rapat evaluasi pelaksanaan eKTP sesama petugas eKTP.	4
4.	Selalu melakukan koordinasi dengan pihak terkait.	2
5.	Hari libur tetap digunakan untuk pendataan eKTP.	1
6.	Melakukan pengaturan pembagian jadwal perekaman dan pengambilan berdasarkan Kelurahan dan RT	2
7.	Melibatkan ketua RT pada saat warganya melakukan perekaman data	5
8.	Melayani perekaman data sampai tengah malam.	7
9.	Alat eKTP berfungsi dengan baik.	3
10.	Adanya Bantuan pinjaman alat dari Mendagri serta diberikannya pelatihan bagi operator eKTP.	4
11.	Kesiapan operator dalam melaksanakan tugas.	4

- 3) Pemetaan hasil Penilaian Operator eKTP pada diagram chart.
Hasil perhitungan *Maturity level* responden operator eKTP yang dipetakan ke dalam diagram chart dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1. Maturity Level Assesment of Deliver and Support Domain

Disini dapat dilihat bahwa *Maturity level value* yang tertinggi berada pada proses PD5 *Ensure System Security* (meyakinkan Keamanan sistem) yaitu pada nilai 3.124 dan *Maturity value* terendah berada pada proses PD1 *Define service level* (menentukan dan mengelolah tingkat layanan) dengan nilai 2.845.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengolahan data dari tabulasi data operator eKTP, rata-rata *Maturity value* dari koesioner operator eKTP adalah 2.982. Menurut standar *Cobit* nilai yang berada diatas 2.5 menunjukkan bahwa proses yang dilaksanakan sudah cukup

baik. Faktor atau kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan eKTP adalah

- 1) Operator eKTP aktif melakukan layanan *Mobile eKTP* menjangkau wajib eKTP yang lanjut usia atau sakit, sehingga target pendataan eKTP dapat tepat waktu.
- 2) Sistem pelaksanaan perekaman eKTP perkelurahan dan per RT telah dijadwalkan dengan baik, dengan melibatkan RT dan lurah setempat untuk turut serta mengontrol warganya saat perekaman eKTP.
- 3) Sistem eKTP dapat mendeteksi dan menghapus data penduduk yang ganda.
- 4) Aplikasi perekaman selalu dijalankan sesuai dengan SOP sehingga pelaksanaan berjalan dengan lancar.
- 5) Operator eKTP yang bertugas memverifikasi, mengupdate dan merekam data setiap selesai perekaman dan segera mengirimkan data tersebut ke pusat.
- 6) Operator eKTP mampu menangani secara teknis permasalahan dilapangan karena telah mengikuti pelatihan dan selalu melakukan prosedur perekaman dengan benar.
- 7) Adanya penambahan waktu perekaman data sampai malam hari setiap hari pada hari kerja, sehingga *dateline* selesainya perekaman dapat tercapai.
- 8) Adanya komitmen yang tinggi dari Dinas Dukcapil, Camat, lurah, RT, operator eKTP, masyarakat dan instansi lain yang terkait untuk mewujudkan pelaksanaan perekaman data ini dengan baik.

Faktor atau kegiatan yang merupakan kendala/masalah pada pelaksanaan eKTP adalah

- 1) Operator eKTP di Kecamatan umumnya bukan merupakan Pegawai tetap Kecamatan (PNS) sehingga menimbulkan kesenjangan antara operator eKTP dengan PNS di Kecamatan.
- 2) Belum ada dokumen prosedur penyelesaian permasalahan eKTP di Kecamatan setempat.
- 3) Tim pokja tidak langsung melayani permasalahan pada saat pendataan eKTP, karena yang bekerja sampai malam adalah operator eKTP yang mayoritas berstatus Pegawai Honorer.
- 4) Pihak penyelia (konsorsium) telah melakukan penyediaan *Database* SIAK dan pemasangan alat, namun tidak bertanggung jawab atas peralatan yang disfungsi.
- 5) Alat perekam data kadang tidak berfungsi dengan baik, pihak penyelia (konsorsium) tidak bisa segera memperbaiki, dikarenakan pekerja konsorsium yang menangani perbaikan alat hanya disediakan 2 orang untuk

melayani kecamatan yang ada di seluruh kota dan kabupaten.

- 6) Data yang tersimpan didalam *database* masih ada yang tidak valid atau ganda sehingga perlu adanya perbaikan perbaikan program aplikasi agar data yang tersimpan benar valid dan dapat terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.
- 7) Masih adanya oknum yang sengaja melakukan usaha penggandaan data dengan cara menyimpan data sidik jari atau iris mata yang bukan miliknya.
- 8) Pencetakan eKTP yang tersentralisasi menyebabkan waktu tunggu pembuatan eKTP tidak dapat dipastikan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk membuat eKTP dalam waktu 1 hari seperti KTP Nasional.
- 9) Masih banyak masyarakat yang merasa belum perlu membuat eKTP karena KTP nasional masih dapat digunakan untuk urusan administrasi di berbagai instansi.

B. *Saran*

Beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk Pemerintah kota adalah

- 1) Dengan hasil temuan ini diharapkan kiranya, hal yang menjadi faktor percepatan perekaman wajib eKTP dapat ditiru oleh provinsi lain sehingga permasalahan administrasi kependudukan di Indonesia yang terjadi selama ini dapat segera diatasi.
- 2) Pemerintah Pusat sebaiknya segera menangani permasalahan dan mempertimbangkan temuan pada penelitian ini, karena permasalahan ini merupakan permasalahan umum yang terjadi diseluruh provinsi, yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan eKTP di Indonesia.

REFERENSI

- [1] Dindukcapil Kab.Muara enim, 2013. "dasar-hukum-tujuan-dan-manfaat-e-ktp. Available at : <http://capil.muaraenimkab.go.id>. [Accessed 30 Mei 2013].
- [2] eKTP. "*Fungsi dan kegunaan eKTP*". Available at : <http://www.e-ktp.com/fungsi-e-ktp/> [Accessed 30 Mei 2013].
- [3] Guritno,Suryo dkk. 2011. "Theory and application of IT Research". Yogyakarta : Andi.
- [4] IT Governance Institue (2000), "Cobit control objectives", 3rd edition. The cobit steering committe and the IT governance institute.
- [5] Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2011. "Prosedur Standar Operasi".
- [6] Pederiva, Andrea.2003.The cobit Maturity Model in a vendor evaluation case. Information System control Journal Vol 3 2003.
- [7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011. "*Perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu tanda penduduk berbasis Nomor induk kependudukan secara Nasional*".
- [8] Wahyudi, J.B. 1992. "Teknologi informasi dan produksi citra bergerak". Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.